



REPUBLIK INDONESIA

PIDATO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAPAN PEMERINTAH

ATAS

PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI

TERHADAP

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023

DI DEPAN RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 2022

**Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.**

Yang kami hormati, Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023. Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif serta persetujuan dari seluruh Fraksi untuk melanjutkan pembahasan pembicaraan pendahuluan terhadap KEM-PPKF Tahun 2023, yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023.

Semua Fraksi bersepakat bahwa setelah dua tahun mengalami pandemi, kini dunia sedang memasuki transisi menuju endemi. Proses pemulihan ekonomi sedang terjadi. Namun semua juga memahami bahwa krisis akibat pandemi, kemudian disusul oleh krisis geopolitik. Potensi dampaknya dapat menimbulkan krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan di berbagai belahan penjuru dunia. Krisis di atas krisis. Seluruh dunia sedang mengalami cobaan yang sungguh teramat berat.

Sungguh masih lekat dalam ingatan kita, seluruh bangsa bersama-sama bahu-membahu untuk mengatasi pandemi. Kecintaan kita kepada tanah air dan kemanusiaan, menggerakkan kita semua untuk bekerja sama, bergerak cepat mengambil kebijakan yang luar biasa untuk secara bersama-sama menghadapi krisis pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Indonesia. Sungguh ini adalah modal bangsa yang luar biasa nilainya di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa, khususnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Dengan modal kebersamaan yang kita miliki ini, kami menyimak dengan sungguh-sungguh pandangan Fraksi-Fraksi atas KEM-PPKF Tahun 2023 yang memberikan dukungan memperkuat peran kritikal APBN agar tetap responsif dan fleksibel sebagai *shock absorber* untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi.

Pada saat ekonomi nasional semakin menguat dan pulih dari krisis akibat pandemi, pilihan kebijakan konsolidasi fiskal tetap harus dilakukan. Pada satu sisi, hal ini untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi sektor swasta untuk semakin pulih. Pada sisi lain, kebijakan konsolidasi fiskal juga akan memastikan kesehatan dan sustainabilitas APBN untuk dapat kembali menyerap tekanan jika terjadi guncangan kembali di kemudian hari. Dengan komitmen bersama ini kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi fiskal, selaras dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan defisit APBN untuk kembali paling tinggi sebesar 3,0% PDB di tahun 2023.

Ikhtiar untuk terus menjaga APBN yang sehat dan berkesinambungan kita perkuat bersama dengan disahkannya dua pilar penting reformasi di bidang fiskal, yakni UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kedua UU tersebut menjadi fondasi penting dalam rangka transisi menuju konsolidasi fiskal yang mulus dan aman, tanpa mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Upaya penguatan *spending better* juga terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan agenda-agenda pembangunan nasional.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Perkenankan kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan dan pandangan yang telah disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Fraksi Partai Golongan Karya; Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya; Fraksi Partai Nasional Demokrat; Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; Fraksi Partai Demokrat; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Fraksi Partai Amanat Nasional;** serta **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.**

Menanggapi pandangan seluruh Fraksi mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi, kami sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi domestik, kami memandang bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional terus menguat. Berkaca pada efek dari periode *commodity boom* di tahun 2011 dan 2012, investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan, terutama dalam memanfaatkan harga komoditas yang tinggi serta akselerasi transformasi ekonomi. Sementara dari sisi investasi publik, keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional serta pengembangan IKN Nusantara akan mendorong pertumbuhan investasi sekaligus menstimulasi aktivitas investasi sektor swasta di masa depan. Membaiknya intermediasi sektor keuangan yang ditandai oleh peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, juga akan turut mendukung aktivitas investasi.

Di sisi lain, dorongan dari konsumsi masyarakat juga akan semakin kuat, seiring dengan perbaikan tingkat kesejahteraan. Pola konsumsi juga akan mulai normal. Jenis-jenis konsumsi yang sempat tertekan di masa pandemi, seperti konsumsi pakaian, sepatu, maupun terkait *leisure* seperti pariwisata dan kunjungan ke pusat-pusat rekreasi akan meningkat di tahun ini dan bahkan menguat di tahun depan.

Meskipun demikian, pandangan Fraksi-Fraksi terkait pertimbangan risiko global terkini terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan Pemerintah. Selain *upside risks* yang kami sebutkan tadi, perekonomian nasional masih harus dihadapkan dengan *downside risks*. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 oleh IMF terkoreksi ke level 3,6% (IMF WEO, April 2022) akibat konflik geopolitik yang diprediksi akan membawa dampak berkepanjangan pada aktivitas perdagangan dunia. Selain itu, implementasi pengetatan kebijakan moneter, khususnya The Fed, yang lebih cepat juga akan mengakibatkan gejolak pasar keuangan global dan pada akhirnya mendorong peningkatan *cost of fund* di semua sektor. Rentang asumsi pertumbuhan yang cukup lebar mencerminkan faktor ketidakpastian yang tinggi dari dinamika perekonomian global. Menghadapi hal ini, APBN tetap dioptimalkan sebagai instrumen *shock absorber* manakala terjadi guncangan.

Dinamika dan prospek ekonomi global tentu saja berdampak pada sektor eksternal (*external balance*) Indonesia tahun 2023. Kinerja ekspor diperkirakan masih kuat. Namun demikian, sejalan dengan menguatnya ekonomi kita, permintaan impor juga akan meningkat. Neraca jasa-jasa juga diperkirakan kembali akan mengalami tekanan sejalan dengan meningkatnya perjalanan ke luar negeri, dari terutama kelompok menengah kaya. Hal ini berpotensi menekan neraca transaksi berjalan (TB) kita. Selain itu, percepatan pengetatan kebijakan moneter the Fed, akan mengakibatkan gejolak pasar keuangan global,

mendorong *capital outflow*, dan pada akhirnya akan menekan neraca transaksi modal dan finansial (TMF) Indonesia. Oleh karena itu, potensi tekanan pada neraca pembayaran kita meningkat di tahun 2023. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pula pada nilai tukar, *yield* SBN dan inflasi di tahun 2023.

Akselerasi transformasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan inklusif pada kinerja pertumbuhan kita. Hal ini ditempuh dengan terus mendorong implementasi agenda reformasi struktural, yaitu peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan regulasi dan birokrasi. Upaya penguatan hilirisasi dan revitalisasi industri akan mendorong peningkatan kinerja sektor manufaktur, sementara pengembangan ekonomi digital akan memacu kinerja sektor jasa moderen, khususnya sektor perdagangan serta informasi komunikasi.

Mempertimbangkan potensi ekonomi domestik yang masih tinggi dan langkah-langkah antisipatif Pemerintah serta potensi risiko ketidakpastian global yang relatif tinggi maka cukup realistis bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh pada rentang 5,3% – 5,9%.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN** terkait asumsi laju inflasi dalam KEM PPKF tahun 2023 pada kisaran 2,0% – 4,0% dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dinamika ekonomi global saat ini diwarnai oleh tingginya tekanan inflasi akibat melonjaknya harga komoditas, terutama setelah pecah konflik Rusia - Ukraina. Di AS dan Eropa, laju inflasi sudah mencatatkan rekor tertinggi dalam empat dekade terakhir, sementara inflasi di Argentina dan Turki masing-masing mencapai 58% dan 70% pada April 2022. Sejalan dengan meningkatnya harga komoditas global, tekanan inflasi domestik juga mulai terlihat meningkat pada April 2022 yang tercatat 3,5%. Selain kenaikan harga komoditas global, faktor

musiman terkait Ramadan dan Hari Raya, serta mulai pulihnya permintaan domestik, juga turut berkontribusi pada naiknya inflasi bulan lalu. Mulai pulihnya permintaan domestik tercermin pada pergerakan inflasi inti (*core inflation*) yang berada dalam tren yang meningkat.

Sejatinya, inflasi domestik berpotensi meningkat jauh lebih tinggi jika kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di *pass-through* ke harga-harga domestik. Namun, potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat kita redam, dengan jalan mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik di dalam negeri untuk tidak naik. APBN berperan penting sebagai *shock absorber* sehingga daya beli masyarakat serta keberlanjutan pemulihan ekonomi tetap dapat dijaga. Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial, terus dilaksanakan sebagai bagian dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga laju inflasi berada pada level yang moderat. Berbagai lembaga internasional memperkirakan inflasi Indonesia tahun 2022 masih berada di bawah 4,0%, dengan *Consensus Forecast* per Mei 2022 pada kisaran 3,6%. Untuk tahun 2023, beberapa lembaga internasional memperkirakan bahwa harga komoditas akan melandai, lebih rendah dibandingkan tahun 2022, meskipun masih berada pada level yang tinggi. Laju inflasi global 2023 juga diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2,0% - 4,0% masih cukup realistis.

Terkait asumsi harga minyak Indonesia, Indonesia *Crude Price* (ICP), kami sependapat bahwa faktor ketidakpastian masih tinggi, khususnya terkait penyelesaian konflik geopolitik serta prospek kinerja ekonomi global, terutama

di AS dan Tiongkok, yang akan berdampak pada keseimbangan *supply – demand* minyak di tahun 2023. Prospek penyelesaian konflik geopolitik dapat merubah peta perdagangan komoditas energi dunia secara signifikan. Demikian juga dengan prospek kinerja ekonomi global, khususnya AS, Eropa dan Tiongkok. Sesuai komitmen Pemerintah, dengan tetap menjaga kesehatan fiskal, peran APBN akan dioptimalkan sebagai *shock absorber* jika terjadi guncangan. Oleh karena itu, APBN perlu dirancang agar tetap hati-hati dan fleksibel. Pemerintah juga terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel. Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa harga minyak mentah global tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2022.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS** dan **Fraksi PAN** terkait langkah antisipatif dalam menjaga fundamental perekonomian domestik dan stabilitas sektor keuangan, dapat kami sampaikan bahwa perkembangan nilai tukar Rupiah dan suku bunga SBN tidak terlepas dari eskalasi risiko ketidakpastian perekonomian global yang cukup tinggi. Sejak meningkatnya konflik geopolitik di Eropa, disrupsi di sisi *supply* menjadi semakin parah sehingga mendorong lonjakan tinggi harga-harga komoditas. Hal tersebut mendorong naiknya tekanan inflasi yang mulai cenderung persisten di banyak negara maju maupun berkembang.

Merespon hal ini, otoritas moneter di berbagai negara mulai mengambil langkah pengetatan kebijakan moneter yang cenderung agresif, terutama di Amerika Serikat. Beberapa langkah kebijakan yang diambil otoritas moneter di Amerika Serikat (The Fed) antara lain penghentian *quantitative easing* yang diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan, serta pengurangan *balance sheet* secara signifikan yang berpotensi membuat likuiditas global semakin ketat. Kombinasi

dari kebijakan tingkat bunga dan penyesuaian *balance sheet* tersebut telah mendorong peningkatan *yield* surat utang US Treasury dan juga berpengaruh pada negara maju lainnya. Hal ini berpotensi membuat volatilitas di pasar keuangan global meningkat, mendorong keluarnya arus modal seiring dengan peningkatan risiko yang terjadi di negara berkembang, dan membuat *cost of fund* menjadi lebih tinggi. Selain itu, kebijakan dollar kuat (*strong dollar policy*) juga ditempuh oleh AS untuk mengatasi inflasi. Kombinasi tingginya suku bunga dan dollar yang kuat akan menyebabkan bertambah ketatnya akses pembiayaan serta meningkatnya beban pembayaran utang (*debt services*).

Dengan memperhatikan bahwa kebijakan yang sama terkait penyesuaian tingkat bunga dan pengurangan *balance sheet* oleh The Fed yang sebelumnya juga pernah diterapkan di tahun 2018 dan berdampak cukup signifikan pada *cost of fund* Pemerintah, maka tidak dapat dihindari potensi terjadinya kenaikan imbal hasil SBN. Peningkatan tersebut akan berdampak pada peningkatan beban bunga APBN.

Mempertimbangkan kondisi tingginya ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter negara maju, dalam hal ini Amerika Serikat, yang diperkirakan masih akan berlanjut hingga 2023, telah mendorong penetapan asumsi tingkat suku bunga SBN 10 Tahun yang lebih tinggi daripada tahun 2022. Namun demikian, Pemerintah secara konsisten mengupayakan agar dapat menekan peningkatan suku bunga, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menekan biaya utang dalam jangka panjang. Pengembangan pasar keuangan dilakukan secara konsisten untuk mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid, yang berdampak dapat memberikan imbal hasil yang relatif rendah bagi Pemerintah.

Selain itu, Kementerian Keuangan bersama dengan anggota KSSK lainnya (BI, OJK dan LPS), berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga volatilitas suku bunga serta menjaga pergerakan nilai tukar rupiah pada kisaran yang ditargetkan agar memberikan kepastian bagi para pelaku ekonomi.

Menanggapi pandangan mengenai isu kesejahteraan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PPP**, dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut.

Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan kontraksi ekonomi nasional juga berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan di tahun 2020. Alhamdulillah, efektivitas kebijakan APBN, khususnya program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta pemulihan ekonomi yang cepat mampu menahan kondisi kesejahteraan masyarakat agar tidak terpuruk terlalu dalam dan bahkan berangsur-angsur pulih.

Tingkat pengangguran pada Februari 2022 tercatat sebesar 5,83%, turun dari 6,26% pada Februari 2021. Selama periode tersebut, perekonomian nasional mampu menciptakan 4,6 juta lapangan kerja baru sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran, tingkat kemiskinan juga mengalami perbaikan signifikan, kembali ke *single digit* sebesar 9,71% di tahun 2021, turun dari 10,19% di tahun 2020.

Indikator kesejahteraan lainnya juga telah mengalami perbaikan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), yang sempat turun di bawah 100, telah kembali menguat di atas 100 pada tahun 2021. Pemerintah akan terus berupaya agar sasaran pembangunan pada tahun 2023 dapat dicapai melalui reformasi kebijakan dan penguatan program-program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2022 serta dinamika dan tantangan perekonomian global dan domestik di atas, kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespon dinamika yang terjadi, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Kebijakan fiskal 2023, diarahkan pada **peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**

Peningkatan produktivitas nasional akan ditempuh melalui upaya akselerasi transformasi ekonomi, yakni memanfaatkan secara optimal sekaligus mengantisipasi tren perubahan yang tengah terjadi pasca pandemi Covid-19 dengan mendorong peningkatan peran sektor-sektor potensial bernilai tambah tinggi. Akselerasi transformasi ekonomi ini tentu saja perlu didukung dengan implementasi sejumlah agenda reformasi struktural, diantaranya penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem logistik, implementasi UU Cipta Kerja, reformasi sektor keuangan, termasuk reformasi fiskal melalui UU HPP dan UU HKPD.

Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural dan reformasi fiskal yang komprehensif dan konsisten, kebijakan fiskal 2023 akan berperan besar menjadi pilar utama kebijakan ekonomi makro untuk memacu kinerja ekonomi nasional, stabilisator jika terjadi guncangan, sekaligus sebagai instrumen utama pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi ke seluruh pelosok dan lapisan ekonomi masyarakat.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara, namun di tengah proses pemulihan ekonomi upaya pencapaiannya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi**

Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP terkait pentingnya mendorong optimalisasi pendapatan negara, antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan.

Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Beberapa terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2023 antara lain melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun kebijakan regulasi. Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi, dan analisis risiko yang lebih dalam. Penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

Sementara itu, penguatan di sisi regulasi ditempuh melalui penerapan UU HPP secara efisien dan efektif termasuk mempercepat penerbitan berbagai peraturan turunannya. Substansi UU HPP menjadi basis hukum dalam reformasi perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat dan UMKM. Beberapa terobosan dalam APBN 2023 diantaranya Pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru. Hal yang juga penting adalah melakukan percepatan implementasi *core tax system* dan meningkatkan aktivitas *digital forensic* untuk mendukung penegakan hukum pajak.

Sejalan dengan terobosan kebijakan pajak, berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk meningkatkan PNBPN juga akan terus diupayakan diantaranya melalui penyempurnaan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara, peningkatan nilai tambah ekonomis, penguatan tata kelola, peningkatan inovasi dan kualitas layanan publik serta optimalisasi dividen BUMN terutama BUMN yang menerima PMN.

Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun Pemerintah optimis berbagai inovasi dan terobosan ini akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara di tahun 2023 sekaligus mendukung peningkatan *tax ratio* dan upaya konsolidasi fiskal. Agar terobosan berjalan lebih efektif, Pemerintah sekali lagi mengajak setiap penyelenggara negara, pejabat publik dan pimpinan pemerintah daerah agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak.

Para Hadirin, Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

Menanggapi pandangan dari **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** mengenai peningkatan kualitas *spending better* untuk mendukung reformasi fiskal, reformasi struktural, transformasi ekonomi, dan belanja perlindungan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah sepakat dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan Anggota Dewan yang terhormat.

Untuk mendukung peningkatan kualitas belanja di tahun 2023, Pemerintah berkomitmen akan melakukan penguatan kebijakan *spending better* melalui penerapan *zero based budgeting* yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional. Dalam konteks *spending better* ini, Pemerintah akan tetap melanjutkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas

belanja sekaligus mendorong belanja yang menciptakan *multiplier effects* dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi.

Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi struktural, peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi, penguatan instrumen *automatic stabilizer* antara lain melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan ditengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi ketidakpastian serta untuk persiapan menuju masa endemi.

Sejalan dengan semangat *spending better* ini, Pemerintah juga menekankan bahwa kualitas belanja daerah harus semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal sekaligus menjadi instrumen penting dalam pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Dana daerah harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh lagi hanya mengendap di perbankan. Ketika kualitas desentralisasi meningkat dan ekonomi pulih kembali, tentu ini menjadi dua kutub yang bekerja sangat kuat bisa membantu Pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan **Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP** terkait defisit dan pembiayaan anggaran, dapat disampaikan bahwa pada dasarnya Pemerintah mengapresiasi pandangan anggota Dewan yang terhormat mengenai pentingnya menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, berdaya tahan, mampu mengendalikan risiko dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan kebijakan fiskal 2023, Pemerintah masih tetap ekspansif dengan menjaga keseimbangan antara kemampuan menjaga momentum pemulihan dengan pengendalian risiko fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal, dimana defisit akan kembali paling tinggi sebesar 3% PDB di tahun 2023. Kami ingin tegaskan bahwa Pemerintah akan tetap menjaga kualitas belanja sebagai *trigger* untuk akselerasi transformasi ekonomi tahun 2023 meskipun dengan besaran defisit yang lebih rendah. Defisit yang lebih sehat tidak akan menghambat peranan belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, utang sebagai instrumen fiskal untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan, dengan tetap dikelola secara *prudent*, dan *sustainable*. Mitigasi risiko utang dilakukan dengan menjaga rasio utang dalam batas terkendali, menerbitkan utang secara oportunistik, hati-hati, serta terus melakukan pendalaman pasar agar *cost of fund* semakin efisien untuk mengurangi beban utang APBN di masa depan. Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan inovatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU.

Ibu, Bapak, para Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2023 dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023. Tanggapan yang lebih lengkap terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini.

Sebagai penutup, atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama

segenap Anggota Dewan selama ini. Semoga Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Terakhir kami mengajak Ibu/Bapak Anggota Dewan yang mulia untuk bersama-sama yakin dan optimis menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Yakin dan optimis yang dilandasi dengan rasa syukur atas capaian, kerja keras, dan kerja sama kita semua. Rasa syukur yang menguatkan kebersamaan, rasa syukur yang membangkitkan kerja keras untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa. Rasa syukur yang menghasilkan gotong-royong dalam memulihkan perekonomian bangsa dan bukan justru sebaliknya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surat Ibrahim ayat 7: *“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat-Ku) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku teramat pedih.”*

**Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq
Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.**

Jakarta, 31 Mei 2022

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

ttd

Sri Mulyani Indrawati